

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya terkait penatausahaan ruangan kelas PKN STAN, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan penatausahaan atas sarana dan prasarana ruangan kelas PKN STAN baik selama pandemi maupun sebelum pandemi tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 Subbagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan (Subaru) merencanakan melakukan inventarisasi aset secara keseluruhan, kemudian akan dilakukan *update* terkait daftar barang ruangnya. Karena pelabelan BMN PKN STAN banyak yang menggunakan label lama (belum menggunakan QR) akan diganti label baru yang sudah menggunakan QR untuk mempermudah proses inventarisasi aset selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi penulis, Kegiatan penatausahaan yang dilakukan Subbagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan (Subaru) PKN STAN yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 181 tahun 2016 tentang

Penatausahaan BMN dan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

2. Kendala yang dialami PKN STAN dalam penatausahaan sarana dan prasarana ruang kelas penulis menjabarkan menjadi 7 (tujuh) kendala antara lain: mobilitas PKN STAN yang sangat tinggi, alih fungsi ruangan kelas, pemakaian ruang kelas yang belum optimal, belum tersedianya daftar barang ruangan (DBR), kapasitas ruangan yang diubah sementara, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas yang belum seragam dan analisis beban kerja. Kendala ini didapatkan saat melakukan wawancara dengan pegawai Subbagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan (Subaru) dan berdasarkan hasil evaluasi penulis saat melakukan peninjauan langsung kegiatan penatausahaan.
3. Upaya yang dilakukan PKN STAN merupakan jawaban atas kendala yang dialami PKN STAN sebagai pengelola BMN PKN STAN. BMN yang dikelola PKN STAN secara keseluruhan tercatat sebanyak 51.758 NUP. Hal ini tercatat dalam laporan BMN yang akan ditampilkan pada lampiran KTTA ini. Dengan BMN sebanyak itu hingga kini masih dikelola sekitar 8 orang pegawai Subbagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan (Subaru) meskipun disisi lain berdasarkan hasil Analisis Beban Kinerja (ABK) dalam pengelolaan BMN di PKN STAN masih membutuhkan 6 orang, yaitu terdiri dari 1 orang dengan jabatan Analis Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Junior dan 5 orang dengan jabatan Pengolah.

4.2 Saran

Berdasarkan dari uraian simpulan di atas, penulis telah melakukan evaluasi yang dituliskan menjadi saran untuk dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya atau alternatif untuk PKN STAN dalam rangka meningkatnya efektivitas pengelolaan BMN.

1. Kendala yang dialami dalam penatausahaan BMN terkait sarana dan prasarana ruangan kelas yaitu belum tersedianya daftar barang ruangan (DBR). Hal ini akan membuat kegiatan inventarisasi barang akan semakin sulit dan tanggungjawab dari pemakai ruangan akan berkurang. Oleh karena itu, diusahakan untuk setiap ruangan diwajibkan/distandarisasi untuk cek ketersediaannya DBR agar penanggung jawab ruangan akan semakin *aware* dengan BMN yang digunakan.
2. Kondisi sarana dan prasarana ruang kelas belum seragam dapat diatasi dengan inventarisasi barang. Apabila barang tersebut meskipun tidak seragam kondisinya masih baik maka tidak ada masalah. Namun ke depannya saat dilakukan perencanaan pengadaan diharapkan setiap sarana dan prasarana ruangan sama antar ruangnya agar tidak terjadinya ketidakseragaman. Hal ini juga tentu dapat mempermudah dalam melakukan kodifikasi BMN dan inventarisasi BMN karena barang serupa.
3. Analisis beban kerja Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan PKN STAN masih cukup berat. Pegawai yang tersedia hanya 8 orang untuk melaksanakan seluruh siklus pengelolaan BMN yang mana dalam siklus pengelolaan BMN terbagi lagi menjadi beberapa kegiatan. Dengan nilai

NUP >50.000 barang kurang cukup SDM yang tersedia untuk mengelola BMN.

Diharapkan yang akan datang terdapat tambahan pegawai dengan mengajukan tambahan pegawai kepada BPPK sebagai eselon 1 diatas PKN STAN.

4. Diharapkan proses inventarisasi aset selanjutnya sudah menggunakan berbasis aplikasi agar dapat memudahkan. Apabila pelabelan sudah menggunakan *quick response code* maka hanya perlu *scanning* ke dalam aplikasi tersebut saat dilakukannya proses inventarisasi aset.